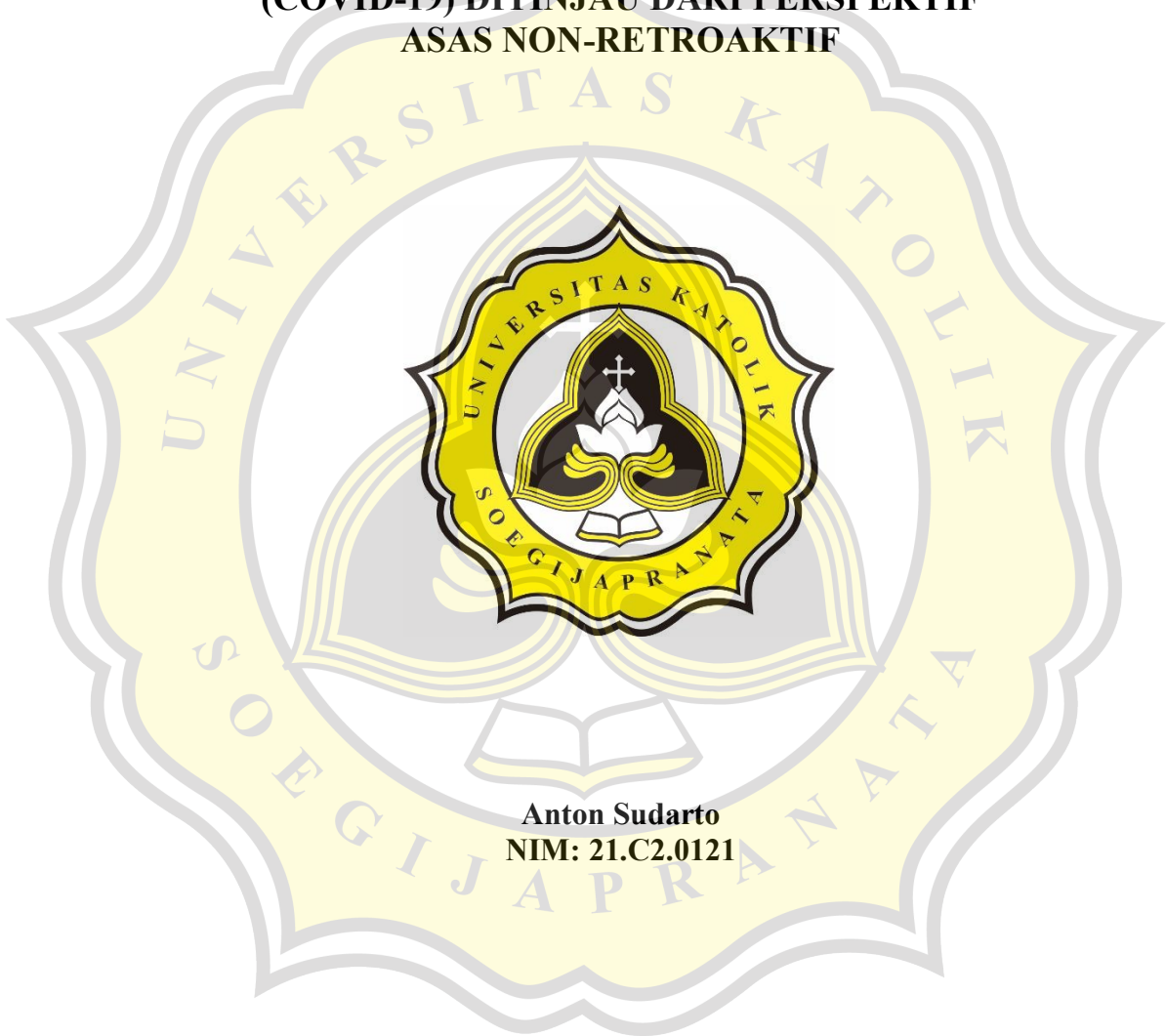


TESIS

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1112 TAHUN
2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGgantian
BIAYA PELAYANAN PASIEN CORONAVIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DITINJAU DARI PERSPEKTIF
ASAS NON-RETROAKTIF**



**Anton Sudarto
NIM: 21.C2.0121**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1112 TAHUN
2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGgantian
BIAYA PELAYANAN PASIEN CORONAVIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DITINJAU DARI PERSPEKTIF
ASAS NON-RETROAKTIF**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh

Anton Sudarto
NIM: 21.C2.0121

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 7 April 2022 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022 merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat teknis operasional dalam rangka kesinambungan, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dan Keputusan Menteri sebelumnya. Bahwa Keputusan Menteri ini, tidak dapat ditafsirkan sebagai peraturan baru yang berlaku surut, tetapi peraturan tambahan untuk melengkapi dan menyempurnakan peraturan sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keabsahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112 Tahun 2022 tentang Juknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 ditinjau dari asas non-rekroaktif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), Konseptual (*conceptual approach*) dan politik hukum (*legal policy approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan data sekunder. Metode Analisis menggunakan metode penalaran *silogisme deduktif* bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1112 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada dasarnya merupakan aturan teknis yang dibuat Menteri Kesehatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melaksanakan suatu pemerintahan di bidang kesehatan, dimana konsep non retroaktif dalam penerapannya dipandang sebagai penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan yang bertujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan guna kepentingan umum dengan tetap berpedoman kepada Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB), bahwa keabsahan Keputusan Menteri Kesehatan ini ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi didasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah merupakan keputusan yang sah.

Kata Kunci : Keputusan Menteri Kesehatan, KTUN, Asas Non-rekroaktif, AUPB, Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya, Keabsahan

ABSTRACT

Decree of the Minister of Health Number 1112 of 2022 concerning Technical Instructions for Claims for Reimbursement of Costs for Services for Patients with Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), which was stipulated on April 7 2022 and applies retroactively from January 1 2022, is a product of a State Administrative Decree (KTUN) which is technically operational in the context of continuity, harmonization and synchronization of regulations and previous Ministerial Decrees. That this Ministerial Decree cannot be interpreted as a new regulation with retroactive effect, but an additional regulation to complement and perfect the previous regulation.

This research aims to determine the validity of the Decree of the Minister of Health Number 1112 of 2022 concerning Technical Guidelines for Claims for Reimbursement of Costs for Covid-19 Patient Services in terms of non-retroactive principles. This research uses a type of normative research with a statutory approach, a conceptual approach and a legal political approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary data. The analysis method uses a deductive syllogism reasoning method starting from a general proposition whose truth is already known (believed) and ending in a conclusion (new knowledge) which is more specific.

The results of the research show that the existence of Decree of the Minister of Health Number 1112 of 2022 concerning Technical Instructions for Claims for Reimbursement of Costs for Services for Patients with Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) is basically a technical regulation made by the Minister of Health as a State Administration Official who has the authority to carry out government in the health sector. , where the non-retroactive concept in its application is seen as the use of the discretion of government officials aimed at facilitating government administration, filling legal gaps, providing legal certainty and overcoming government stagnation in the public interest while remaining guided by General Principles of Good Government (AUPB), that the validity of this Decree of the Minister of Health is viewed from the aspects of authority, procedure and substance based on the provisions of Legislative Regulations and General Principles of Good Government and is a valid decision.

Keywords : ***Decree of the Minister of Health, KTUN, Non-Retroactive Principle, AUPB, Technical Instructions for Cost Reimbursement Claims, Validity***